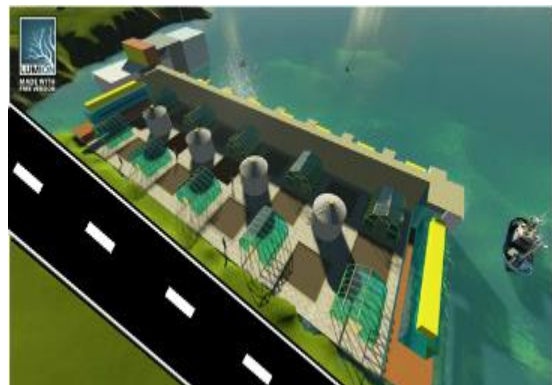


LAMPIRAN

1.1 Kondisi Pasar Mardika Pra Renovasi



1.2 Bentuk Gambar 3D Proyek Renovasi Pasar Mardika



Analisis:

Pasar: Renovasi Pasar Mardika (1&2), merupakan kios-kios Penjual aneka buah, daging Ikan ataudagangan lainnya. (3) merupakan pintuk masuk Pasar, (4) Pengelolaan limbah pasca transaksi, (5) office pasar. Sedangkan untuk **Pelabuhan** yang berada didepannya: (1) Spesifikasi pada kapal angkut barang dagang antar pulau Maluku. Baik tu terminal container, maupun kapal Veri. (2) Spesifikasi pada terminal multi purpose. Baik ruang tunggu pengunjung pengguna layanan jasa traveling dengan menggunakan kapal.

HASIL WAWANCARA

AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN TIMUR INDONESIA MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN INOVATIF BERBASIS *SUKUK (STUDI KASUS: PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS NASIONAL DI PROVINSI MALUKU)*

Nama : Dr. Djalaludin Salampessy. S.Pi. MSi
NIP : 197102121998031012
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian Pengembangan BAPPEDA Provinsi Maluku.
Instansi : BAPPEDA Provinsi Maluku
Hari/tanggal : Senin 02 Juli 2018

Tanggapan narasumber mengenai konten penelitian:

Jika berbicara mengenai proyek infrastruktur strategis nasional kalao tidak salah sudah bertender nasional. Program pusat yang dilakukan berlokasi di Provinsi Maluku, dengan demikian tidak ada keterkaitanya dengan penyediaan daerah terhadap proyek tersebut. Mulai dari penyiapan lahan, sampai pada pembangunan infrastruktur sampai pada kedepannya cetak sawah, semuanya terhitung merupakan proyek nasional. Pada umumnya proyek-proyek tersebut menggunakan sumber pendanaan dari APBN sehingga jika ditanyakan terkait skema pembiayaan inovatif berbasis sukuk sebenarnya pemerintah daerah tidak mengetahui secara detail pola seperti apa yang digunakan, melihat seringkali menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Nantinya proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional ini ditangani dan dikoordinir secara langsung oleh pemerintah pusat. Dimana pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran dana untuk proyek-

proyek dimaksud. Contohnya bendungan way apu kedudukan pemerintah daerah bertugas untuk menyiapkan lahan, tentunya dalam penyiapan lahan tersebut akan melibatkan masyarakat lokal setempat sehingga nantinya pembahasan lahan tersebut masyarakat disekitar lokasi akan diberikan dana ganti rugi sesuai dengan perjanjian harga yang telah disepakati.

Tanggapan penulis: (pada dasarnya maksud penelitian yang dilakukan penulis ialah, penulis berupaya melihat sasaran proyek yang diselenggarakan pemerintah pusat terlebih dahulu setelah dikaji dan diteliti kemudian disesuaikan dengan skema pendanaan berbasis sukuk yang disiapkan. Melihat minimnya dana alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan. Sehingga dari analisis tadi akan menghasilkan apakah proyek tersebut relevan atau tidak dengan skema pendanaan sukuk yang nantinya akan dijalankan. Karena dalam hal ini peneliti menyiapkan klasifikasi pendanaan berbasis sukuk ini nantinya diperuntukan untuk proyek-proyek infrastruktur publik yang memiliki nilai urgensi tinggi “Revitalisasi pasar mardika kota ambon” melihat lajur perekonomian masyarakat kota ambon yang bertumpu pada pasar tersebut).

Jawaban: Baik dalam program pembangunan infrastruktur nawa cita Jokowi dodo tersebut Pemerintah Provinsi Maluku sendiri mengusulkan 13 proyek strategis diantaranya: pembangunan jalan fly over Sudirman, revitalisasi pasar mardika kota ambon, pembangunan pelabuhan terintegrasi wai.

Tanggapan: Apakah proyek pembangunan pelabuhan yang akan dibangun tersebut memegang peran penting dalam membantu akomodasi (para pedagang) untuk membawa hasil dagangannya dari daerah ke kota?

Jawaban: Bantul. Akan tetapi itu pun diusulkan untuk dibiayai dari nasional. Jadi pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran untuk proyek tersebut. Selain itu juga Proyek blok marsela, bendungan way apu, jalan trans maluku, institute teknologi ambon, rumah sakit UPT dsb. Ada ada 13 proyek saya lupa akan tetapi pembangunan infrastruktur diatas merupakan proyek-proyek strategis yang kita usulkan yang berlokasi di kota Ambon. akan tetapi sekali lagi skema

pendanaan/pembiayaan pembangunan tersebut tidak menggunakan alokasi dana dari daerah akan tetapi peruntukan alokasi dana yang digunakan ialah menggunakan alokasi dana dari pusat atau APBN.

2. Saya pernah membaca dalam salah satu media online bahwa peruntukan dana alokasi khusus untuk wilayah kota ambon mengalami penurunan. Akan tetapi saya belum tahu realitanya apakah hal tersebut benar adanya atau hanya sebuah berita hoax?

Jawaban: Berbicara mengenai dana alokasi khusus atau (DAK) pada dasarnya dana tersebut ditangani secara langsung oleh kementerian tertentu, salah satunya dikatakan terdapat DAK infrastruktur yang diperuntukan untuk permasalahan ke PU-an, perhubungan dsb. Ada pula DAK khusus yang diperuntukan untuk permasalahan kesehatan. Pada dasarnya DAK terdiri dari 3 jenis yakni: (DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK infrastruktur) dan ke tiga DAK tersebut terdapat di Maluku. Jika berbicara pada program-program pendekatan pada provinsi maluku sendiri memiliki beberapa kawasan-kawasan perbatasan yakni 3 kabupaten perbatasan ditambah 2 kawasan, diatanya: (Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara) semua kawasan tersebut masuk dalam Kawasan perbatasan. Adapun peruntukan kawasan perbatasan tadi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 jenis dana alokasi khusus atau DAK baik DAK afirmasi (pendekatan-pendekatan tertentu), DAK regular, maupun DAK infrastruktur. Misalnya kita ambil salah satu contoh proyek blok marselah dimana proyek ini merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dilaukan untuk eksploitasi migas yang berada pada kawasan startegis. Yang dimasud dengan strategis ini ialah dimana kabupaten maluku tenggara barat (saumlaki) berada pada wilayah perbatasan. Jadi untuk pembiayaan dan seluruh aktifitas perencanaan pembangunan tersebut diusulkan untuk dibiyaain dari pusat dengan skema pembiayaan tadi.

Tanggapan penulis: berdasarkan data yang saya dapatkan KPPIP bahwa untuk maluku sendiri terdapat 3 proyek yang masuk dalam daftar pembangunan infrastruktur strategis nasional yang ada di danai, adapun data proyek yang bapak

sebutkan belum masuk dalam daftar pembangunan infrastrukturnya yang akan di biayai oleh pemerintah pusat bapak?

Jawaban: Iya benar kenapa belum didanai karena proyek yang lainnya belum masuk dalam RPJMN. Karena usulan proyek yang kami ajukan cenderung dinamis misalnya pembangunan revitalisasi pasar mardika. Revitalisasi pasar mardika ini ketika saat presiden berkunjung dalam rangka hari pers nasional, beliau mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan revitalisasi pasar mardika tersebut, jadi by accident.

Tanggapan penulis: (Dari saya sendiri selaku peneliti bahwa, kenapa saya mengajukan skema pendanaan berbasis sukuk ini diajukan untuk proyek revitalisasi pasar mardika ini. Melihat dari situasi masyarakat yang bertumpu di pasar tersebut, selain itu dari beberapa berita online yang saya baca bahwa sebenarnya pasar mardika ini masuk dalam klasifikasi pasar yang secara nasional sudah seharusnya di revitalisasi pada beberapa tahun sebelumnya. Akan tetapi sampai pada tahun 2018 ini belum juga ter-realisasi. Maka timbul asumsi pribadi saya apakah terkendala dana sehingga dari kami selaku anak-anak ekonomi syariah berinisiatif untuk mengusulkan model skema pendanaan non-apbn spesifikasi pada pembiayaan Syariah berbasis sukuk ini sebagai salah satu instrument alternatif guna membantu keberlangsungan proyek tersebut).

Jawaban: Boleh. Artinya alternatif tersebut disampaikan kepada pemerintah dimana eksekutif akan berbicara untuk persetujuan legislatif, apakah skema tersebut layak atau tidak, boleh atau tidak. Melihat hal tersebut akan masuk dalam hutang daerah. Dimana jika masuk dalam hutang daerah secara tidak langsung APBD daerah yang akan memiliki andil paling besar dalam hal tersebut. Sementara APBD daerah kita termasuk salah mendapatkan APBD yang kecil hanya 2,8 T untuk 2018.

Jawaban: Karena ada penentuan dana alokasi umum berdasarkan kriteria luas daerah, luas daratan, jumlah penduduk, ada biangan pembangi yang memeberikan peluang terhadap besarnya dana alokasi umum yang di dapatkan.

1. Pendapat bapak mengenai pembangunan infrastruktur terkait pengembangan wilayah yang ada di Maluku dengan di Jawa?

Jawaban:

Karakteristik geografisnya berbeda, Maluku berbasis kepulauan, dan Jawa berbasis kontinen. Infrastruktur di Jawa terkoneksi dari semua sisi, dan Maluku dipisahkan oleh laut. Maka, metode pengembangannya juga berbeda, yaitu berbasis gugus pulau, dibagi dalam 12 gugus pulau utama untuk daratan dan 3 laut pulau untuk lautan. Pembagian ini berdasar kriteria seperti koneksi budaya, kesamaan orientasi, kemiripan ekonomi, sektor produksi. Kemudian pengembangan wilayah ini juga berpengaruh terhadap pembangunan infrastrukturnya, pengelolaannya juga membutuhkan pengelolaan khusus.

2. Bagaimana dengan keadaan sarana prasarana infrastrukturnya hingga saat ini?

Jawaban:

Sangat baik, kalau dalam konteks darat. Hampir wilayah di Maluku sudah terkoneksi dalam konteks darat dengan layanan trans masing-masing. Transportasi laut juga sudah menjangkau dan menyinggahi titik terjauh. Terdapat juga 12 lapangan udara/ bandara, yang dapat menghubungkan kota-kota utama. Artinya infrastruktur dalam bentuk perhubungan sudah berjalan dengan baik. Infrastruktur dalam bentuk sumber daya listrik sudah hampir menjangkau seluruh Maluku, dan selebihnya yang belum terjangkau listrik diberi bantuan *the solar cell*, telekomunikasi juga sudah banyak menjangkau seluruh Maluku, dan secara umum sudah terkoneksi. Infrastruktur dasar dalam kesehatan, pendidikan, dan keumuman, sudah ada dan terpenuhi. Memang pada titik tertentu masih ada belum yang terjangkau dan terkoneksi, namun seiring waktu mulai dijangkau dan dikoneksikan.

3. Berapa persentase pencapaian pembangunan infrastruktur pada periode ini?

Jawaban:

Tidak bisa dipersentasekan akumulatif, melainkan per sektor. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Bisa dikatakan persentase pembangunan sudah mencapai lebih dari 70 persen.

4. Adakah list khusus mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur di titik yang belum terjangkau tadi?

Jawaban:

Ada, pertama ada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) selama 20 tahun, RTRW (Rencana Taruna Wilayah) 20 tahun, dan RPJMD selama 5 tahun.

5. Bagaimana progres proyek infrastruktur nawacita dalam periode ini?

Jawaban:

Maluku menerima manfaat dari proyek nawacita ini. Ada Nawacita 3, untuk daerah tertinggal dan pinggiran, ada 8 daerah tertinggal, seperti Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, Serang Barat, Serang Timur, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru. Proyek nawacita yang dimaksud adalah jalur perhubungan laut dengan program implementasi tol laut.

6. Apa yang menjadikan 13 Proyek strategis ini menjadi utama bagi Maluku?

Jawaban:

Untuk memberikan ruang terhadap aktifitas ekonomi bagi masyarakat utamanya, dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

7. Apakah regulasi yang ada sudah mampu mendukung berjalannya pembangunan infrastruktur yang ada?

Jawaban:

Jelas sangat mendukung, regulasi dibuat sebagai arah dan pedoman implementasi. Akan tetapi memang tidak setiap regulasi dapat terus-menerus dipakai, tentunya ada penyesuaian dengan konteks zaman, sehingga perlu direvisi. Terdapat juga simpang siur kebijakan dikarenakan bertolak belakangnya regulasi satu dengan yang lain, sehingga revisi diperlukan.

8. Sejauh mana perkembangan pembangunan terkait 13 proyek strategis infrastruktur yang ada di Maluku?

Jawaban:

Sudah berjalan, ada yang perkembangannya sudah dalam tahap realisasi seperti Bendungan Wayapo, dan adapun Blok Masela sedang dikembangkan oleh pihak ketiga, dan seterusnya.

9. Darimana saja target pemenuhan pembiayaannya?

Jawaban:

Pemerintah Daerah mendapat pemenuhan biaya dari DAU (Dana Alokasi Umum), kemudian didapat juga dari DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana langsung Kabupaten, dan kemudian juga Dana Desa, itu semua disesuaikan dengan PAD.

10. Pihak mana saja yang dilibatkan oleh daerah dan menjadi mitra dalam proyek strategis ini?

Jawaban:

Pihak stake holder yang terkait dengan pembangunan atau proyek tersebut, semisal Bendungan Wayapo, maka yang dilibatkan adalah Masyarakat setempat yang bertani, Dinas, Lembaga, dan Swasta yang memiliki kepentingan dalam pengairan dan irigasi lahan sebagai pemenuhan swasembada pangan. Mitra utamanya adalah para kontraktor dan konsultan serta tenaga kerja dalam proyek tersebut.

11. Apakah dalam keberlangsungannya proyek, nilai anggaran dana proyek tersebut dapat berubah?

Jawaban:

Jadi, dana dalam proyek terdapat dua, ada anggaran dana murni dan anggaran dana perubahan. Anggaran dana murni merupakan dana perhitungan awal yang didapat dari hasil studi dan analisis pembangunan. Sedangkan dana perubahan ialah dana yang disesuaikan dengan perubahan, atau hal tertentu yang menjadi alasan perubahan semisal terdapat kenaikan harga bahan pokok, kecelakaan kerja, krisis moneter yang berdampak pada pembangunan. Anggaran murni biasanya ditetapkan pada per-30

November, sebelum kemudian ditetapkan perubahan berjalan pada pertengahan tahun sesudahnya, biasanya pada bulan juni dan juli.

12. Bagaimana dengan skema pendanaannya?

Jawaban:

Skemanya berbentuk kerja sama pembangunan, dirumuskan melalui Musrembang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan).

13. Apakah ada upaya dari pemerintah daerah untuk melibatkan swasta terhadap skema pendanaan ini?

Jawaban:

Pemerintah terus membuka pelibatan dari pihak swasta dan investor, namun memang masih sedikit. Ada perusahaan tingkat daerah bernama panca karya yang berinvestasi modal untuk ASDP dengan membangun prasarana penunjangnya saja.

14. Apakah ada jaminan dan asuransi kerja saat pelibatan swasta atau investor?

Jawaban:

Ada, karena sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan.

15. Sejauh ini apakah ada langkah pemerintah daerah bekerja sama dan berhubungan dengan lembaga keuangan setempat?

Jawaban:

Pemerintah masih mandiri dalam soal pembangunan infrastruktur, dan memang perlu menggandeng suatu lembaga keuangan yang dapat menunjang, karena APBD Maluku terbilang kecil.

16. Proyek-proyek seperti apa sebagai contoh yang diperlukan oleh pemerintahan daerah untuk kemudian bekerja sama dengan pihak swasta atau investor?

Jawaban:

Perhubungan, pertambangan, budidaya rumput laut, mutu produk rempah dan lain sebagainya, swasta dapat masuk ke sektor-sektor tersebut.

17. Apakah ada ketentuan khusus dalam penggunaan dana anggaran tersebut?

Jawaban:

Tentu saja ada, dalam kontrak sudah termaktub semisal terdapat 30 persen pencairan pertama, dan seterusnya, semua terdapat ketentuan khusus.

18. Berapa kali pencairan dana anggaran proyek tersebut dan bagaimana klasifikasi peruntukan dana tersebut?

Jawaban:

Biasanya terdapat 2 sampai 3 kali. Tahap pertama 30 persen, kedua 50 persen, dan ketiga 20 persen. Klasifikasi pertama untuk survey awal dan laporan pendahuluan, kedua analisis dan laporan pertengahan, dan yang ketiga laporan tambahan dan evaluasi.

19. Biasanya proyeksi pemenangan tender para kontraktor itu seperti apa?

Jawaban:

LPSE yang merupakan lembaga pengadaan tender, dan penilaian tender itu dengan harga termurah.

20. Apakah sukuk ekonomi syariah mampu menjadi solusi relevan untuk membantu pembangunan infrastruktur nasional maupun daerah?

Jawaban:

Cukup relevan, karena pemerintah membutuhkan penunjang yang dapat membantu pemerintah dalam pembangunan.

21. Bagaimana pandangan bapak terkait proyek Pasar Mahardika terkendala akibat kebutuhan pokok masyarakat dan keadaan masyarakat?

Jawaban:

sepertinya tidak, secara umum tidak.

22. Bagaimana pandangan bapak terkait penerbitan sukuk daerah atau sukuk ritel sebagai stimulus pembangunan daerah?

Jawaban:

Penerbitan ini relevan, ditentukan melalui analisis studi kelayakan yang didasarkan pada kemampuan pengembalian utang, atau kebutuhan dana yang ada.

23. Apakah proyeksi penerbitan sukuk ini dapat menjadi stimulus semisal dalam revitalisasi Pasar Mahardika?

Jawaban:

Penerbitan ini bisa dijadikan alternatif, karena pemerintah daerah sudah mengajukan ke pemerintahan pusat.

24. Rencananya kapan akan dimulai revitalisasi Pasar Mahardika tersebut?

Jawaban:

Baru pada tahun 2019.

25. Apakah mungkin proyek lain dapat dimasukkan skema pendanaan melalui penerbitan sukuk ini?

Jawaban:

Untuk sementara ini belum memikirkan sampai sejauh itu, karena anggaran dana masih menerima bantuan dari pusat.

26. Apakah di Maluku ini terdapat proyek yang macet, diblacklist, dan diberhentikan?

Jawaban:

Ada, yaitu PLTU di lain, karena investor yang memenangkan tender terlilit hutang. Ada proyek pembangunan jalan, karena investor terlibat masalah hutang.

27. Apa konsekuensi apa yang dilakukan pemerintah daerah?

Jawaban:

Ditinda sesuai peraturan, bisa aset perusahaan disita, dan pertanggung jawaban ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

28. Harapan besar untuk Maluku apa ke depannya?

Jawaban:

Melanjutkan program yang ada, dengan evaluasi program dan capaian program, melihat indikator makro seperti target pertumbuhan ekonomi, target pemberantasan kemiskinan, target peluang lapangan kerja, target inflasi dan lain sebagainya. Selain itu juga memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan rakyat.

HASIL WAWANCARA

AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN TIMUR INDONESIA MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN INOVATIF BERBASIS SUKUK (STUDI KASUS: PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS NASIONAL DI PROVINSI MALUKU)

Nama : Christian Fernando
Jabatan : STAR
Instansi : SATKER PJN 2 MALUKU
Hari/Tanggal : 09 Juli 2018

1. Bagaimana keadaan infrastruktur berupa jalan ruas yang ada di Maluku?

Jawaban:

Ada 7 ruas jalan belum semuanya teraspal, belum dikatakan baik, masih ada jalan dan jembatan yang putus.

2. Sasaran wisata apa saja yang melewati jalan 7 ruas Maluku?

Jawaban:

Salah satunya adalah Pantai Ora

3. Apa langkah awal dari tahap pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan bidang?

Jawaban:

Tahap pembangunan bukan dari kita, kita hanya bagian finishing saja. Adapun tahapan awal ialah perencanaan berupa studi kelayakan, kemudian jika layak maka baru dilaksanakan pembangunan infrastruktur, dan kemudian finishing pembangunan. Kita juga ikut menjalankan proyek ini, kemudian mencari penyedia jasa untuk

menjalani kontrak kerja, selanjutnya kita memonitoring atau mengawasi penyedia jasa tersebut dalam menjalankan proyek.

4. Dari mana saja penyedia jasa tersebut biasanya?

Jawaban:

Penyedia jasa ini kan perusahaan, jadi bisa dari mana saja, karena proyek ini kan bersifat terbuka. Semua boleh mendaftar tender.

5. Apa aspek yang paling penting dari program pelaksanaan pembangunan ini sesuai bidang?

Jawaban:

Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (*monitoring*).

6. Bagaimana konten pengawasannya?

Jawaban:

Dengan mengawasi sesuai spesifikasi, apabila ada kendala masalah segera diidentifikasi kendala permasalahannya sesuai monitoring.

7. Apa masalah yang sering muncul saat proses pelaksanaan?

Jawaban:

Keterlambatan bahan material pembangunan.

8. Bagaimana mengakses presentasi harga bahan material secara umum di Maluku per-kawasan?

Jawaban:

Ada dalam perencanaan yaitu basic rish, datanya ada di dinas.

HASIL WAWANCARA

AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN TIMUR INDONESIA MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN INOVATIF BERBASIS SUKUK (STUDI KASUS: PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS NASIONAL DI PROVINSI MALUKU)

Nama : Bambang Haryo Nugroho
NIP : 20060074
Jabatan : Branch Manager
Instansi : PT. Bank Muammalat, Tbk. Ambon
Hari/Tanggal : 03 Juli 2018

1. Menurut bapak bagaimana perkembangan sarana prasaran yang ada di Maluku?

Jawaban:

Selama 1,5 tahun terakhir ini, secara kasat mata belum terlalu signifikan, dan masih banyak kendalanya, karena selama ini yang saya tahu Dana Alokasi Pusat dari Pemerintah Pusat ke Daerah berdasarkan ruas daratan. Pembangunannya belum maksimal.

2. Bagaimana dengan infrastruktur publik?

Jawaban:

Sejauh ini cukup bagus, meskipun banyak yang mesti diperhatikan seperti Taman untuk masyarakat umum dan area untuk parkir,

kendaraan semakin banyak, maka layanan publik akan kendaraan juga harus diadakan.

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai perbandingan antara pembangunan infrastruktur di Maluku ini dengan yang ada di Pulau Jawa?

Jawaban:

Di Jawa infrastruktur lebih padat karena menyesuaikan situasi dan kondisinya yang lebih padat, makanya contoh fasilitas publik seperti parkirnya bisa di bawah tanah, bisa juga berbentuk vertikal. Kalau di Maluku mungkin bisa menerapkan parkir yang sesuai juga dengan situasi dan kondisi yang ada.

4. Asal mula Bank Muamalat berkembang dan tumbuh di Maluku?

Jawaban:

Bulan Oktober 2006 resmi beroperasi di kota Ambon. Perjalanan selama 12 tahun, pertumbuhan dana dari masyarakat kota Ambon cukup tinggi kepercayaannya terdapat Bank Syariah. Data OJK mengungkap 400 miliar dana Bank Syariah Muamalat di Maluku, dan Total aset sebanyak 550 Miliar.

5. Berapa banyak jumlah pegawai saat awal berdiri?

Jawaban:

Hanya sekitar 8 orang, dan sekarang 18 orang.

6. Layanan apa yang pertama dimunculkan Bank Muamalat di Maluku?

Jawaban:

Tabungan muamalat dengan memakai akad *mudharabah* bagi hasil. Walaupun dalam perjalanannya terdapat banyak layanan dari Muamalat,

seperti simpanan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*, serta penyaluran seperti pembiayaan dengan skema akad jual beli syariah.

7. Kendala apa saja yang ditemui selama ini?

Jawaban:

Kendala utama adalah persepsi masyarakat, karena selama ini masyarakat saat masih terdoktrin dengan bunga, masih menganggap aneh dengan sistem bagi hasil, dan mengidentikan sesuatu dengan bunga.

8. Apakah ada prospek pembiayaan muamalat yang terkait dengan pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Ini erat kaitannya dengan pemerintah pusat dan daerah, kita masih belum bisa maksimal dalam bersanding dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pembayaran dan pembiayaan berbasis syariah. Terkait pembangunan infrastruktur, sebetulnya dari sini pemerintah lebih berinisiatif dan mempunyai ide (karena fungsi kita hanya sebagai pengepul dan intermediasi) untuk kemudian nanti menerbitkan suatu obligasi syariah atau suatu surat utang kepada masyarakat untuk membiayai proyek tertentu, dengan memberikan bonafit kepada masyarakat yang berinvestasi. Semua stake holder terkait dapat duduk bersama untuk membahas terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur yang selama bergantung dari dana APBD.

9. Bagaimana pandangan bapak selaku praktisi ekonomi syariah tentang posisi Maluku yang masuk pada proyek Nawacita?

Jawaban:

Maluku terdapat daerah 3T yang menjadi prioritas pembangunan. Selama ini pembangunan infrastruktur selalu bergantung pada APBN, padahal APBN diprioritaskan kebanyakan untuk belanja negara. Maka selain bergantung pada APBN, mesti ada sumber lain yang mendukung pembangunan infrastruktur Maluku, seperti investor yang melibatkan stake holder lokal.

10. Apakah ada model pembiayaan yang menjadi pemikiran bank muamalat?

Jawaban:

Kami hanya menjadi pihak kedua, Database terbesar ada di bank syariah. Pemerintah dapat menerbitkan sukuk yang sudah sesuai dengan fatwa syariah nasional bekerja sama dengan bank syariah untuk kemudian ditawarkan dan dibeli oleh masyarakat dengan bonafit yang sesuai.

11. Presentasi keuntungan dan pola kerjanya seperti apa dari model pembiayaan ini?

Jawaban:

Seperti mirip dengan deposito, kalau masyarakat berinvestasi mesti berpikir berapa bonafit laba yang didapat tanpa resiko dan terjamin.

12. Bagaimana pandangan umum bapak tentang sukuk sebagai salah satu sumber instrumen dopingan untuk APBN Negara?

Jawaban:

Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan sukuk ritel seri 10 untuk pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia. Pada prinsipnya sukuk adalah salah satu sumber instrumen pembiayaan yang sudah banyak diminati oleh banyak kalangan. Pertama, karena berdaya bersaing karena menysar seluruh kalangan masyarakat tidak hanya muslim, kedua, digunakan untuk masyarakat sesuai dengan syariat, ketiga, dapat

diperdagangkan kembali sesuai mekanisme pasar. Itu kelebihannya. Akan tetapi masih banyak kalangan masyarakat yang masih belum memandang bagus dan memandang sebelah mata pada sistem syariah ini.

13. Lebih baik mana SBSN dengan ritel untuk saat ini untuk pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Sukuk ritel lebih terjangkau waktunya karena jangka panjang dan beban menjadi rendah dibanding SBSN. Sukuk ritel seluruh masyarakat bisa membeli karena ada maksimal pembeliannya. Pembiayaannya juga terjangkau oleh kelas ekonomi masyarakat Indonesia yang kebanyakan menengah. Artinya antusiasme masyarakat tinggi untuk saat ini.

14. Apakah relevan SBSN bila disandingkan dengan model pembiayaan lain?

Jawaban:

Tergantung kekuatan APBN, dengan jangka waktu tertentu. Dan bukan masalah relevan atau tidaknya, karena sebetulnya lebih melihat urgensi dan hasil pemanfaatannya saat itu.

15. Bagaimana dengan presentasi risikonya?

Jawaban:

Mesti diperhitungkan sendiri, ketika misalnya proyek diambil swasta, risiko yang timbul adalah reputasi pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

16. Untuk rekomendasi kepada pemerintah daerah, apakah untuk saat ini sukuk memang harus dioptimalkan?

Jawaban:

Saat ini Sukuk ritel itu buming untuk daerah, saya yakin akan ada di daerah yang membeli sukuk ritel. Sukuk ritel itu dapat dioptimalkan dengan melakukan analisa oleh pemerintah terhadap keuangan daerah, artinya melihat kekuatan APBD, tentunya harus ada penyesuaian antara pihak-pihak terkait dalam hubungan dan pemahaman pembangunan infrastruktur melalui sukuk ritel ini.

17. Apa benar Dana Alokasi Khususnya diperkecil sehingga dana pembangunan Maluku menjadi minim?

Jawaban:

APBD ini masih ditentukan oleh luas wilayah sebagaimana tercantum dalam regulasi, sehingga menjadi kecil. Tapi memang ada juga erat kaitannya dengan kepentingan politis, seperti adanya ketidakjelasan penganggaran di luar APBD yang masih simpang siur dan menjadi wacana saja.

18. Semisal pemerintah pusat menerbitkan sukuk ritel untuk infrastruktur pasar mahardika, bagaimana kemudian peran lembaga keuangan dalam hal ini?

Jawaban:

Pemerintah menerbitkan dengan tenaga penjual yang ditunjuk dan sesuai. Bank muamalat semisal bisa saja lolos dan bisa, dan jika lolos maka akan dibuat di seluruh Indonesia. Adapun pendekatannya suatu lembaga keuangan ini dengan nilai pendekatan kedaerahan.

19. Bagaimana pandangan bapak tentang Pasar Mahardika dengan kondisi seperti sekarang ini?

Jawaban:

Saya kalau belanja disana mesti diatas jam 8 malam, karena tidak macet dan bahan makanan seperti sayur ada yang baru datang dan masih

fresh. Artinya pasar ini masih belum teratur secara maksimal dalam hal akses jalan dan faktor keamanan serta kenyamanan, sehingga perlu direvitalisasi. Revitalisasinya terkait berbagai hal yang dianggap urgen, seperti reklamasi, TPH (Tempat Pemotongan Hewan) yang perlu dialihkan lokasinya antara pemotongan sapi dan babi, relokasi lokalisasi terselubung, semua itu harus didukung dengan regulasi dan implementasi yang kuat.

20. Apakah bapak meyakini bahwa karena adanya sebagian besar masyarakat Maluku yang berwiraswasta baik sampingan maupun profesi utama ini, sehingga menjadi pasar mahardika ini perlu direvitalisasi?

Jawaban:

Faktor yang paling utama adalah aspek budaya lokal, masyarakat lokal yang berjualan entah dimanapun bahkan di pinggir jalan yang membuat sesak dan sempit, itu tidak akan diusir. Bisa jadi mereka merupakan pedagang musiman yang memakai lahan umum. Itulah yang kemudian menjadi perhatian dan faktor yang membuat adanya revitalisasi.

21. Apa harapan bapak untuk Maluku ke depannya tentang ?

Jawaban:

Pasar Mahardika memiliki nilai historis, terdapat berbagai macam suku budaya disana, memunculkan budaya lokal yang perlu dilestarikan,terlebih Pasar Mahardika saat ini lebih didominasi hasil bumi, di kemudian hari harapan saya dapat menjadi pasar kebudayaan dengan ekonomi kreatif. Sehingga semua orang yang dari manapun ingin kembali lagi ke Ambon Maluku karena pasar kebudayaan ini.

FOTO DOKUMENTASI

1. Foto Dokumentasi Sesi Wawancara bersama Bpk. Bambang Haryo Nugroho



2. Foto dokumentasi Sesi Wawancara bersama Bpk. Ir. Ismail Usemahu, MT



3. Foto dokumentasi sesi wawancara bersama Bpk. Hendri Tofan Abdullah, SE



4. Foto dokumentasi sesi wawancara bersama Bpk. Dr. Jalaludin Salampessy, S.Pi., M.Si



5. Foto Dokumentasi Sesi Wawancara bersama Bpk. Yulianti Hart



6. Foto Dokumentasi Sesi Wawancara bersama Bpk. Judeth Wattimury.



7. Foto Dokumentasi Sesi Wawancara bersama Bpk. Ahmad Mujahid Madaul



8. Foto Dokumentasi Sesi Wawancara bersama Bpk. Christian Fernando



